



**PENERAPAN PRINSIP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PERBANKAN SYARIAH**

**(Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank
Rakyat Indonesia Syariah)**

SKRIPSI

Oleh :
DEWI MASRUOH
NIM 120810301009

**JURUSAN S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PERBANKAN SYARIAH
(Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank
Rakyat Indonesia Syariah)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

DEWI MASRUOH

NIM 120810301009

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT dan dengan penuh rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan almarhum ayah tercinta atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tidak terhingga;
2. Adek-adek dan seluruh anggota keluarga atas nasihat, dukungan, dan doa tulusnya;
3. Guru-guru di kehidupan penulis atas ilmu, pengetahuan, dan jasanya yang tiada tara;
4. Semua sahabat, teman seperjuangan, kakak tingkat di kampus dan di organisasi;
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Man Sara 'ala Darbi Washala

Siapa yang berjalan dijalanNya akan sampai ke tujuan

(Imam Syafi'i)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Masruroh

NIM : 120810301009

Judul Skripsi : PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERBANKAN SYARIAH (Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan termasuk karya jiplakan, kecuali terdapat kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2016

Yang menyatakan,

Dewi Masruroh

NIM 120810301009

SKRIPSI

**PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PERBANKAN SYARIAH
(Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank
Rakyat Indonesia Syariah)**

Oleh

DEWI MASRUOH

NIM 120810301009

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Wasito, M.Si., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
DALAM PERBANKAN SYARIAH (Analisis Bank Syariah
Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat
Indonesia Syariah)
Nama Mahasiswa : Dewi Masruroh
N I M : 120810301009
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 08 Desember 2016

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Wasito, M.Si., Ak.
NIP. 196001031991031001

Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak.
NIP. 197004281997021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak
NIP. 19640809 199003 2 001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM
PERBANKAN SYARIAH**

**(Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank
Rakyat Indonesia Syariah)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dewi Masruroh

NIM : 120810301009

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

27 Desember 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Djoko Supatmoko MM, Ak. (.....)
NIP. 195502271984031001

Sekretaris : Septarina Prita DS, M.SA, Ak. (.....)
NIP. 198209122006042002

Anggota :Aisa Tri Agustini, SE, M.Sc. (.....)
NIP. 198808032014042002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak
NIP 197107271995121001

Dewi Masruroh

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui perbankan syariah sudah melaksanakan Islamic Corporate Governance dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance maupun dari laporan tahunan melihat contoh terakhir pelaporan pada tahun 2014. Penelitian ini mengambil obyek dari perbankan syariah perseroan yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Data yang diambil berupa dokumentasi yang sudah dilaporkan pada setiap website resmi ketiga obyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga obyek bank syariah sudah melaksanakan sebagian Islamic Corporate Governance yang dilaporkan dalam laporan GCG dan secara keseluruhan sudah menerapkan Islamic Corporate Governance dengan tambahan penerapan di laporan tahunan.

Kata Kunci: BNIS, BRIS, BSM, Good Corporate Governance, Islamic Corporate Governance

Dewi Masruroh

Accounting Department, Faculty of Economic and Business, University of Jember

Abstract

Qualitative research aims to know the Islamic banking is already carrying out Islamic Corporate Governance report implementation of Good Corporate Governance as well as from the annual report see last example reporting in 2014. This research takes the object of Islamic banking company Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). The data is taken in the form of documentation which is already reported to be the third official website on each object. The results showed that the third object of Islamic banks already implement some Islamic Corporate Governance that report in the report of GCG and overall it's been applying Islamic Corporate Governance with an additional implementation in the annual report.

Keywords : BNIS, BRIS, BSM, Good Corporate Governance, Islamic Corporate Governance

RINGKASAN

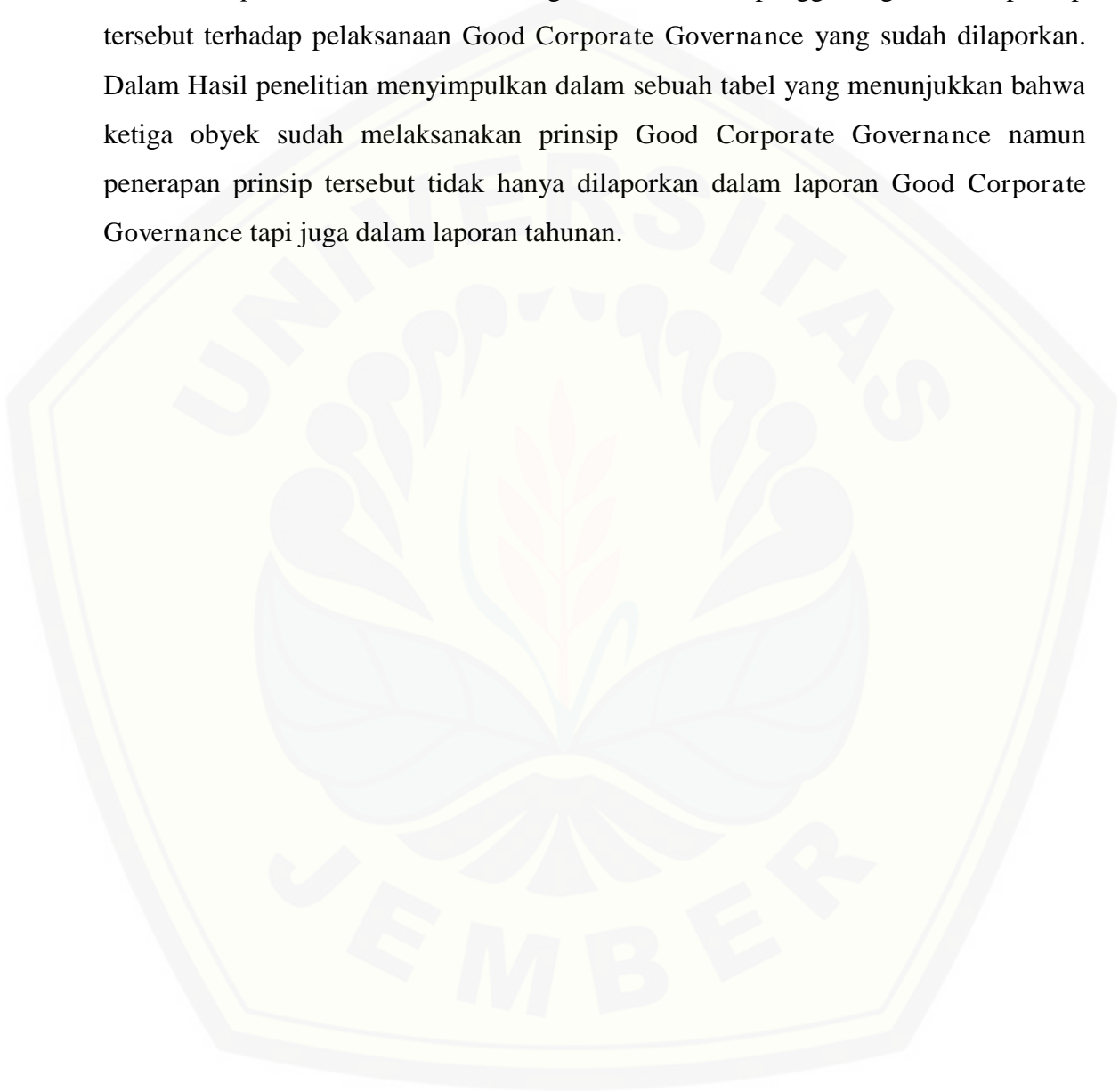
Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance dalam Perbankan Syariah (Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah; Dewi Masruroh; 120810301009; 2016; 174halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Perkembangan Bank Syariah terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu 43,99% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,55% (Junusi, 2011). Salah satu meningkatnya bisa disebabkan bank syariah mampu bertahan dikala krisis seperti dalam krisis tahun 1998. Namun mindset masyarakat masih banyak yang menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional dan kepercayaan masyarakat pun turun. Dan sebagai keunggulan dan peningkatan kinerja dan nilai bank syariah dapat menerapkan Good Corporate Governance. Namun saat ini penerapan Good Corporate Governance masih menggunakan adopsi dari bankkonvensional baik dari prinsip maupun dari pedoman. Sehingga muncullah konsep Good Corporate Governance from Islamic Perspective yaitu prinsip Islamic Corporate Governance. Dan dengan adanya konsep Islamic Corporate Governance dapat menjadi pertimbangan pelaksanaan dari adanya penerapan Good Corporate Governance yang dibuat berdasar adopsi bank konvensional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Islamic Corporate Governance dalam Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kontruksi yang menggabungkan prinsip Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance. Tujuan adalah untuk mengetahui dari penerapan GCG pada saat ini sudah ataukah belum dalam melaksanakan Islamic Corporate Governance yang dapat menjadi prinsip yang baik bagi bank syariah.

Penelitian berasal dari analisis ketiga obyek bank dengan mengungkapkan pelaksanaan Good Corporate Governance yang kemudian dinilai dalam prinsip Islamic Corporate Governance dan bagaimana analisis penggabungan kedua prinsip tersebut terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance yang sudah dilaporkan. Dalam Hasil penelitian menyimpulkan dalam sebuah tabel yang menunjukkan bahwa ketiga obyek sudah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance namun penerapan prinsip tersebut tidak hanya dilaporkan dalam laporan Good Corporate Governance tapi juga dalam laporan tahunan.



PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Islamic Corporate Governance dalam perbankan Syariah (Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik;
4. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Drs. Wasito, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Ahmad Roziq, SE., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam memberikan bimbingan, saran, kritik, motivasi dan do’a yang sabar dan tulus;
6. Seluruh bapak atau ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat;
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Kedua orang tua, Umi Hanik dan Alm Moch. Ya’kup atas kasih sayang dan doa tulus ikhlas;

9. Adik-adikku, Luluk Zahroh, Chalimatussa'diah dan Umi Laila serta keluarga besar yang sudah memberikan do'a dan motivasi dengan ikhlas
10. Semua sahabat seperjuangan (Yeny, Ajeng, Iir, Priska, Mentari, Iis, Novi, Yerry, Aini, Octa, Ati, Indri, Firda, Atul, Fitri, Tika, Silvi) yang menginspirasi
11. Semua kader UKM Bastiling Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Forum Kerohanian Kampus Universitas Jember
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulisan berikutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 27 Desember 2016

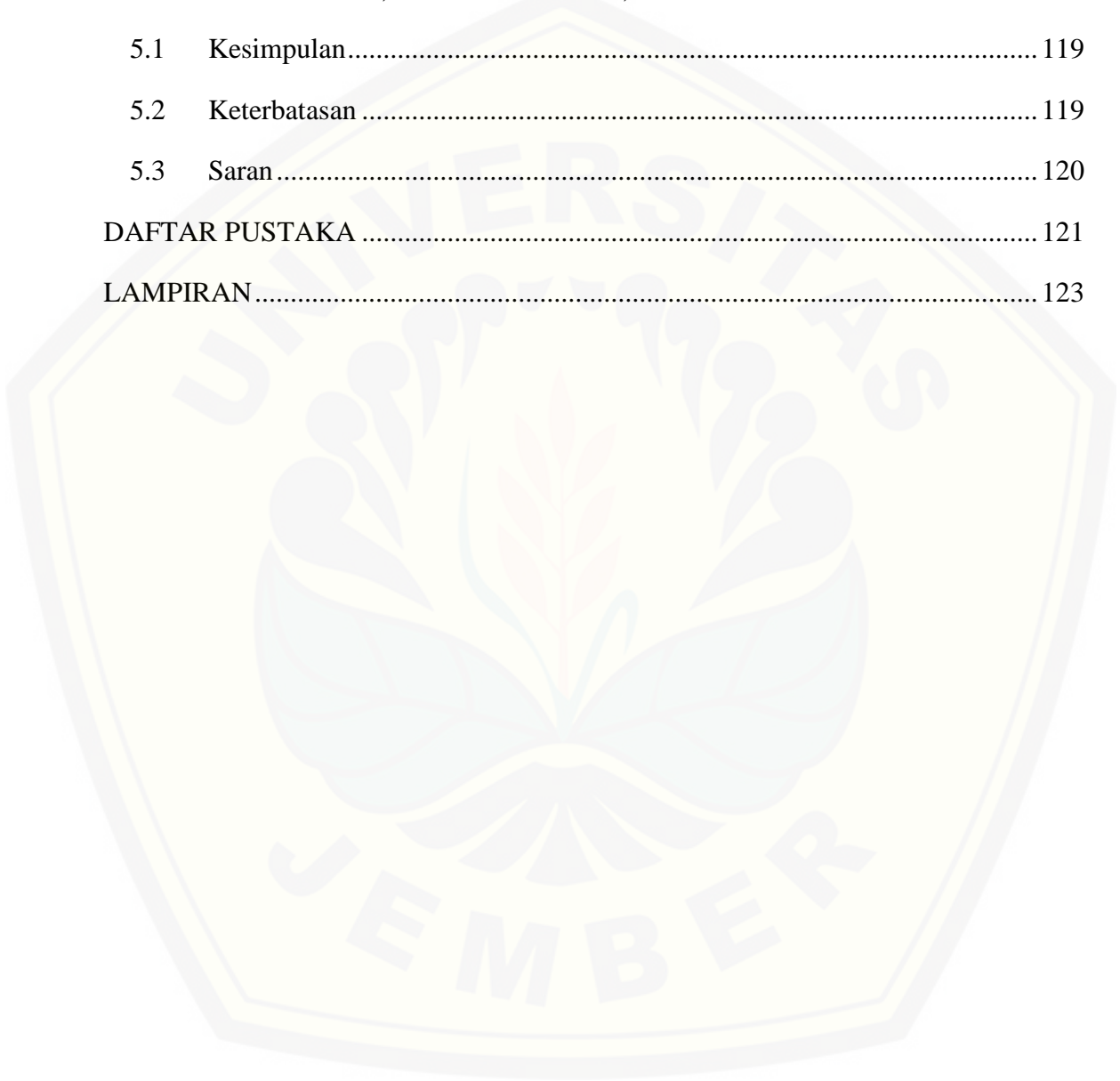
Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Bank Syariah.....	5

2.1.2 Good Corporate Governance	12
2.1.3 Islamic Corporate Governance	15
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	22
BAB III. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Unit Analisis	23
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.4 Uji Keabsahan Data.....	23
3.5 Metode Analisis Data	24
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah.....	26
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Profil Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.....	27
4.1.1 Profil Bank Syariah Mandiri (BSM).....	27
4.1.2 Profil Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)	28
4.1.3 Profil Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRISyariah).....	29
4.2 Hasil.....	30
4.2.1 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance.....	30
4.2.2 Klasifikasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	71
4.2.3 Penerapan Islamic Corporate Governance	72
4.3 Pembahasan	113
4.3.1 Tabel Rangkuman Indikator Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang masuk dalam pelaksanaan prinsip Islamic Corporate Governance	113

4.3.2 Tabel Rangkuman Indikator Pelaksanaan Islamic Corporate Governance	115
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Keterbatasan	119
5.3 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	123



DAFTAR TABEL

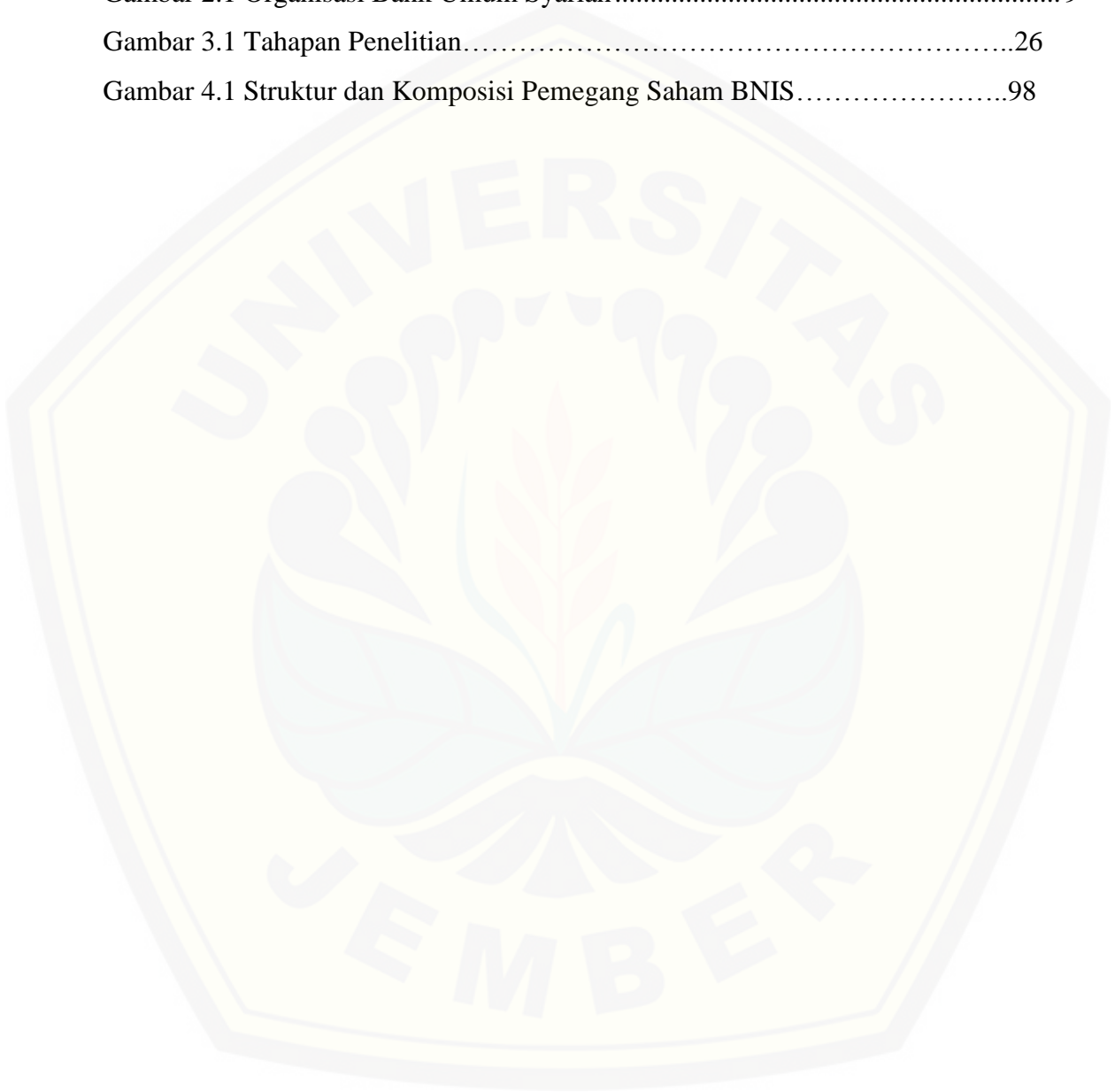
Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional	10
Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Hasil Self Assesment Periode I 2014 BSM	34
Tabel 4.2 Hasil Self Assesment Periode II 2014 BSM	35
Tabel 4.3 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris BSM.....	36
Tabel 4.4 Kepemilikan Saham Direktur BSM	38
Tabel 4.5 Rangkap Jabatan DPS BSM.....	38
Tabel 4.6 Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain Periode I BSM.....	39
Tabel 4.7 Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain Periode II BSM	40
Tabel 4.8 Total Remunerasi dan fasilitas lain BSM	40
Tabel 4.9 Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain per orang Periode I BSM.....	41
Tabel 4.10 Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain per orang Periode II BSM	41
Tabel 4.11 Total Remunerasi dan fasilitas lain per orang BSM	42
Tabel 4.12 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	42
Tabel 4.13 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Periode I BSM.....	43
Tabel 4.14 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Periode II BSM	43
Tabel 4.15 Frekuensi Rapat DPS BSM.....	44
Tabel 4.16 Internal Fraud BSM	45
Tabel 4.17 Permasalahan Hukum BSM	45
Tabel 4.18 Laporan Dana Sosial BSM.....	48
Tabel 4.19 Kepemilikan Saham Dewan Komisaaris BNI Syariah	49
Tabel 4.20 Hubungan Keuangan Dewan Komisaaris BNI Syariah	49
Tabel 4.21 Hubungan Keluarga Dewan Komisaaris BNI Syariah.....	50
Tabel 4.22 Rangkap Jabatan Dewan Komisaaris BNI Syariah.....	50
Tabel 4.23 Kepemilikan Saham Direktur Utama dan keluarga BNI Syariah	51
Tabel 4.24 Kepemilikan Saham Direktur Bisnis dan keluarga BNI Syariah	51

Tabel 4.25 Kepemilikan Saham Direktur Risiko dan Kepatuhan beserta keluarga BNI Syariah.....	52
Tabel 4.26 Kepemilikan Saham Operasional beserta keluarga BNI Syariah.....	52
Tabel 4.27 Rangkap Jabatan DPS BNI Syariah	53
Tabel 4.28 Struktur dan Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris BNI Syariah	54
Tabel 4.29 Struktur dan Kebijakan Remunerasi Direksi BNI Syariah	55
Tabel 4.30 Struktur dan Kebijakan Remunerasi DPS BNI Syariah	55
Tabel 4.31 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah BNI Syariah	56
Tabel 4.32 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris BNI Syariah.....	57
Tabel 4.33 Frekuensi Rapat DPS BNI Syariah	57
Tabel 4.34 Internal Fraud BNI Syariah.....	58
Tabel 4.35 Permasalahan Hukum BNI Syariah	58
Tabel 4.36 Pendapatan Non Zakat BNI Syariah	60
Tabel 4.37 Rincian penggunaan Dana Non Zakat BNI Syariah	61
Tabel 4.38 Hubungan Keuangan dan/atau Kekeluargaan Dewan Komisaris BRIS ...	62
Tabel 4.39 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris BRIS	62
Tabel 4.40 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.....	63
Tabel 4.41 Kepemilikan Saham, hubungan keuangan dan keluarga Dewan Komisaris BRIS	64
Tabel 4.42 Kepemilikan Saham Direksi BRIS	64
Tabel 4.43 Rangkap Jabatan DPS BRIS	65
Tabel 4.44 Jumlah Remunerasi dan fasilitas lainnya BRIS	66
Tabel 4.45 Jumlah Remunerasi dan fasilitas lainnya per orang BRIS	66
Tabel 4.46 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah BRIS	67
Tabel 4.47 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris BRIS	67
Tabel 4.48 Frekuensi Rapat DPS BRIS	68
Tabel 4.49 Internal Fraud BRIS	69
Tabel 4.50 Permasalahan Hukum BRIS.....	69
Tabel 4.51 Rincian Penyaluran Dana Sosial BRIS	70

Tabel 4.52 Rincian Pendapatan Non Halal BRIS	71
Tabel 4.53 Pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris BSM.....	78
Tabel 4.54 Pengunduran diri Anggota Direksi BSM.....	78
Tabel 4.55 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.....	79
Tabel 4.56 Pengangkatan Anggota Direksi.....	79
Tabel 4.57 Anggota Dewan Komisaris	79
Tabel 4.58 Anggota Direksi	80
Tabel 4.59 Pemegang Saham BSM.....	83
Tabel 4.60 Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan BSM.....	85
Tabel 4.61 Jumlah Penerima Bantuan Sarana Umum BSM	85
Tabel 4.62 Jumlah Penerima Bantuan Lingkungan Lembaga BSM.....	86
Tabel 4.63 Pemegang Saham BNIS	98
Tabel 4.64 Program Bidang Kesehatan dan Lingkungan BNIS	99
Tabel 4.65 Pemegang Saham BRIS	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Organisasi Bank Umum Syariah 9
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.....26
Gambar 4.1 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham BNIS.....98



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BSM.....	124
Lampiran 2. Rincian Penyaluran Dana BSM.....	134
Lampiran 3. Hasil Self Assesment	136
Lampiran 4. Daftar Konsultasi, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu oleh BRIS.....	137
Lampiran 5. Pelaporan Kode Etik BNIS.....	139
Lampiran 6. Laporan Keuangan BSM	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7. Laporan Keuangan BNIS	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8. Laporan Keuangan BRIS.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia ada sejak tahun 1992 dengan diawali berdirinya Bank Muamalat. Berdirinya Bank Muamalat mengalami gunjangan pada saat tragedi 1998, namun masih bisa bertahan. Bank Muamalat membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi yang memporakporandakan bank-bank konvensional. Pada awal tahun 2000-an, bank syariah mulai mengalami kemajuan dengan dukungan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang kemudian disusul dengan peraturan lembaga keuangan syariah hingga saat ini. Perkembangannya pun mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan kenaikan dari lembaga keuangan non syariah. Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu 43,99% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,55% (Junusi, 2011).

Perkembangan bank syariah saat ini belum menunjukkan mindset yang baik dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang cenderung menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Faktor yang terdapat dalam perbankan syariah dapat menjadi salah satu permasalahan terbesar yang dapat menetapkan mindset masyarakat terhadap perbankan syariah. Maka untuk meningkatkan keunggulan dan identitas bank syariah dengan melihat dari sisi penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Di Indonesia pada saat ini, prinsip yang digunakan dalam Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah peraturan yang dibuat dari adopsi sebelumnya, yaitu prinsip dari bank konvensional. Dalam penelitian Junusi (AICIS XII) Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah.

Pedoman umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 juga menjelaskan dalam latar belakang poin 6 bahwa Pedoman GCG ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Dan prinsip GCG konvensional yang dikeluarkan adalah GCG konvensional yang sudah disusun oleh tim yang dibentuk KNKG dengan mengundang beberapa lembaga terkait GCG serta mendapat masukan tertulis dari banyak lembaga, pakar hukum dan universitas.

Dari prinsip Good Corporate Governance syariah yang dibuat dari adopsi konvensional, maka muncullah Good Corporate Governance from Islamic Perspective dalam prinsip Islamic Corporate Governance yang dapat menjadi pertimbangan pelaksanaan dari adanya penerapan pelaporan Good Corporate Governance yang dibuat berdasar adopsi konvensional di Indonesia.

Tata kelola dengan menerapkan prinsip Islamic Corporate Governance diharapkan dapat menjadi tata kelola unik dan baik dalam perbankan syariah. Tata kelola yang baik dalam suatu perbankan dituntut sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadits yang mencerminkan pribadi Islami. Karena dari pedoman keduanya terdapat jalan yang memberikan berbagai solusi kehidupan umat. "Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri". (QS An Nahl: 89). Dan dari pedoman tersebut memberikan jalan yang istiqomah untuk tetap berada dalam koridor yang benar. " Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amalsaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar". (QS Al Isra':9). Menurut Abu-Tapanjeh (2009), Meskipun ekonomi Islam yang melakukan sebagian besar fungsi yang sama seperti ekonomi konvensional, selalu ada bentuk unik yang berbeda dari perbedaan antara kedua penerapan prinsip.

Konsep berdasarkan Islamic Perspective adalah sebuah kebutuhan prinsip-prinsip tata kelola walaupun selama ini bukan sesuatu yang baru atau asing. Bahkan

selama berabad-abad Islam mengalami kejayaannya dalam segi aspek, tetapi dengan infiltrasi ekonomi konvensional modern yang mengarah ke salah menaruhkan peradaban Islam. Maka dari adanya prinsip Islamic Corporate Governance ini, dapat menjadi pembeda dengan konvensional dan menjadikan ciri khas dari syariah yang berdasarkan nilai-nilai islami.

Penelitian ini melihat dari sisi tiga bank syariah di Indonesia. Ketiga bank syariah itu adalah bank syariah yang memiliki badan hukum perseroan dan juga merupakan ketiga bank yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia dari sekian banyak bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance dalam Perbankan Syariah (Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan prinsip Islamic Corporate Governance dalam Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Islamic Corporate Governance dalam Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberimanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan keilmuan mengenai Islamic Corporate Governance di Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun masukan bagi bank syariah terkait Islamic Corporate Governance yang dapat menjadi bahan dalam kegiatan manajemen, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya baik bagi bank syariah yang diteliti maupun bagi bank syariah lainnya.

3. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk memberikan masukan dalam kebijakan yang dapat bermanfaat dalam peningkatan keilmuan mengenai Islamic Corporate Governance di Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Islamic Corporate Governance untuk mengembangkan dalam penelitian selanjutnya dan dapat memberikan dampak positif bagi perbankan syariah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berisi penjelasan dari materi yang bersangkutan dengan penelitian. Dari penjelasan teori dapat menjelaskan fenomena yang dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Landasan teori dalam penelitian ini, dibagi menjadi tiga bagian, menjelaskan tentang Bank Syariah, Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance.

2.1.1 Bank Syariah

A. Perkembangan Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (UU no 21 th 2008). Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank di Indonesia dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan.

Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dikatakan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Casuarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amant Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia (Antonio, 2014:25).

B. Struktur Organisasi

Menurut Antonio (2014: 30-33) Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis syariah.

1. Dewan Pengawas Syariah

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Pengawas Nasional.

Menurut PBI No 11/33/PBI/2009 menjelaskan dalam pasal 47, Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran

kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, meliputi :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2. Dewan Pengawas Nasional

Dewan Pengawas Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Pengawas Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Pengawas Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Fungsi lain dari Dewan Pengawas Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan

Pengawas Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

Dewan Pengawas Nasional adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi maupun wewenang berdasarkan penjelasan dari organisasi DSN MUI, yaitu :

Tugas & Fungsi DSN MUI

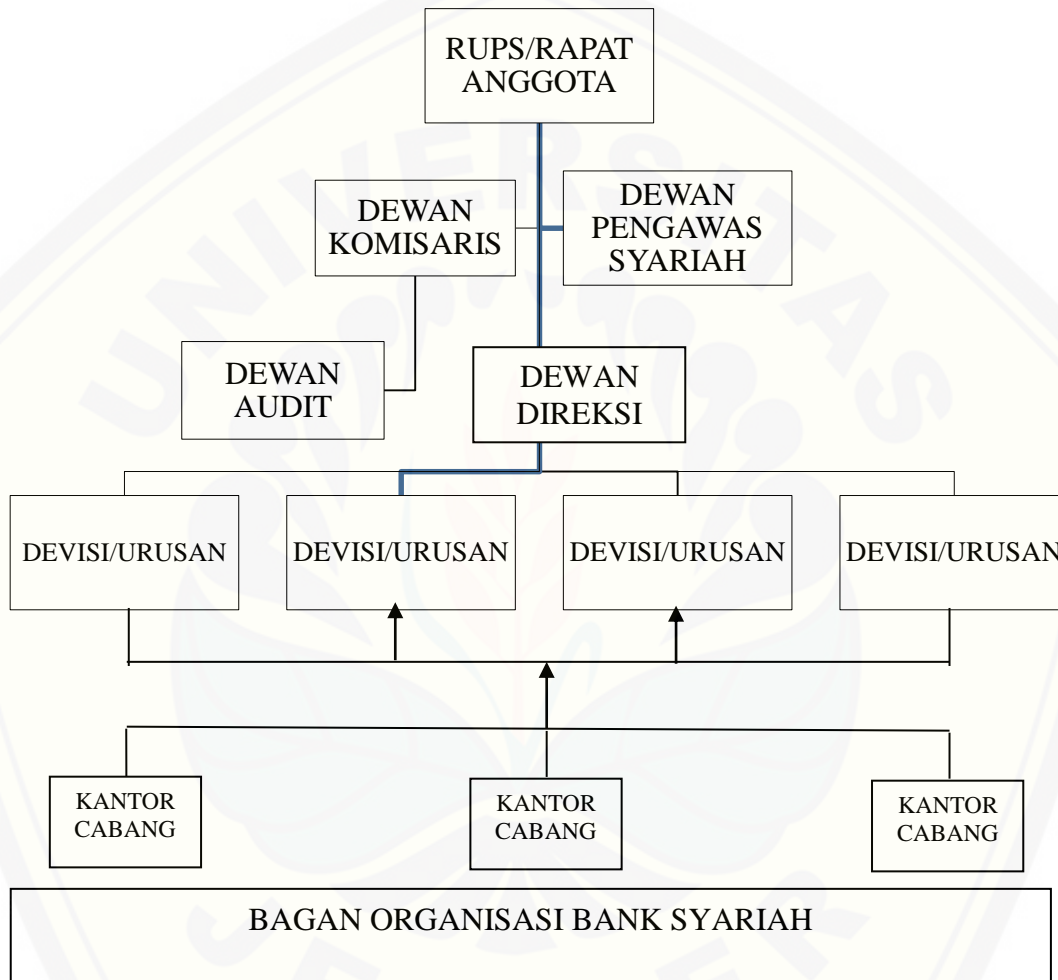
- Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
- Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Wewenang DSN MUI

- Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

- Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Gambar 2.1 Organisasi Bank Umum Syariah



Sumber: (Muhammad, 2010:46)

Menurut PBI Nomer 11/33/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Keduanya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

NO	PERBEDAAN	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakjelasan (gharar)	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana masyarakat berupa simpanan harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan tanpa memperhitungkan aspek halal atau tidaknya sektor tersebut
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber: (Muhammad, 2010:45).

4. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah menurut Antonio (2014)

1. Prinsip Titipan atau simpanan (Depository / al-Wadi'ah)

Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. Bagi Hasil (Profit – Sharing)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musarakah, al-mudharabah, al-*muzara'ah*, dan al-musaqah.

3. Jual Beli (Sale and Purchase)

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai'al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai'al-istishna'*.

4. Sewa (Operational Lease and Financial Lease)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.

5. Jasa (Fee-Based Services)

Prinsip Jasa terdiri atas Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn dan Al-Qardh.

5. Kontrol Bank Syariah menurut Antonio (2014: 209-211)

Pengendalian Diri Sendiri (Self Control)

Pengendalian Diri Sendiri (Self Control) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal.

1. Pengendalian Menyatu (Built-in Control)

Selain self control, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (built in control).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya dual control, dual custodian, maker checker approval, limitation, segregation of duties, verifikasi, dan lain-lain.

2. Auditor Internal

Untuk dapat menyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian meyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilai dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (independen). Selain itu, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi-fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis-lapis.

3. Eksternal Auditor

Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya.

2.1.2 Good Corporate Governance

A. Pengertian Good Corporate Governance

Kata Governance berasal dari bahasa Perancis “Gubernance” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata Governance sering diterjemahkan secara harfiah sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Perhatian dunia terhadap good corporate govrnance mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia (Sutojo dan Aldrige dalam Arani, 2010).

Definisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur).

GCG (Good Corporate Governance) yang didefinisikan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia/ FCGI (2001) adalah corporate governance

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks dalam Kaihatu, 2006). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG oleh Monks, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

B. Tujuan Good Corporate Governance

Tujuan dari Good Corporate Governance seperti yang dinyatakan dalam OECD (1999: 34) adalah bertujuan, (1) untuk mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, (2) meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi, (3) mengurangi biaya modal, (4) menyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan dan (5) penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para stakeholders. Selanjutnya dalam rangka menerapkan good governance perlu adanya standar atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam praktik pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan nilai dan kelangsungan perusahaan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD,1999:25) telah mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Fairness, (b) Transparency, (c) Accountability, dan (d) Responsibility.

C. Prinsip-Prinsip GCG

Ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu: Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 12/13/DPbS tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar.

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Islamic Corporate Governance

Percobaan dibuat untuk membandingkan prinsip islam dalam tata kelola dengan prinsip OECD yang sudah direvisi. prinsip islam dalam tata kelola atau Islamic Corporate Governance adalah (Abu-Tapanjeh, 2009)

1. Menjamin dasar untuk efektifitas kerangka corporate governance

- Mempromosikan bisnis dengan kerangka etis syariah

Muslim berhak untuk melakukan kegiatan bisnis mereka sebagai dipandu oleh kode Syariah etik, yang mendorong untuk menjadi adil, wajar dan jujur untuk semua orang yang terlibat dalam bisnis. Maka dari itu dalam perbankan syariah memiliki kode etik sendiri yang tidak lepas dari nilai-nilai islami.

- Percaya di laba dan rugi

Perbankan memiliki tanggung jawab secara vertikal maupun horizontal. Horizontal bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemegang kepentingan. sedangkan vertikal bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan percaya bahwa laba rugi yang sudah dijalankan oleh perbankan yang kemudian dilaporkan atau dipublikasikan setelah melalui proses dan pengauditan merupakan bentuk percaya bahwa yang udah dilaporkan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban.

- Keunggulan peradilan dan kesejahteraan sosial dengan sosial dan kewajiban spiritual

Umat Islam perlu bekerja dan menghasilkan serta menjadi tidak menjadi malas dan tidak produktif. Disebutkan dalam Al-Qur'an (6,132): "Untuk semua derajat-derajat (atau pangkat) menurut perbuatan mereka". Menjelaskan bahwa sistem apapun tanpa sikap etis dari individual tidak akan mempengaruhi sistem yang baik dari pemerintah. Diperlukannya aturan yang bisa meningkatkan kualitas dari individual perbankan supaya tidak terjadi penyimpangan, maka perlu adanya tindakan yang jelas seperti pendataan

permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagai bentuk penjagaan untuk keberlanjutan perbankan.

- Larangan bunga

Haqqi dalam Abu-Tapanjeh (2009) menyatakan bahwa salah satu larangan paling penting terhadap penyalahgunaan, kekayaan adalah larangan riba, yang diterjemahkan umumnya berarti "riba" atau kepentingan. Pernyataan ini impetes bahwa keutamaan bisnis Islam adalah adil, dan transaksi jujur, di mana semua jenis eksploitasi dilarang. Lewis dalam Tapanjeh (2009) benar menunjukkan di sini bahwa, "Islam selalu mendorong perdagangan dan perdagangan selama itu dilakukan dalam kerangka Al-Qur'an, dan firman Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad (saw). Adanya DPS dalam perbankan syariah adalah salah satu cara menjaga bank syariah tetap islami.

2. Hak shareholders dan fungsi-fungsi kepemilikan utama/pokok

- Kekayaan sebagai kepercayaan dari Allah SWT

Islam mengamanatkan manusia sebagai wali Allah dalam segala situasi dan kepercayaan utamanya adalah untuk tetap Allah, pemilik akhir dari segala sesuatu di dunia ini. Konsep dasar akuntabilitas Islam diyakini bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu dalam bentuk kepercayaan. pengungkapan maka sebenarnya dari fakta-fakta keuangan, dan informasi yang akurat harus bebas tersedia untuk pengguna. Hal penting lain yang terlibat dalam pengungkapan adalah untuk memberikan pengguna informasi yang memadai yang diperlukan untuk keputusan finansial. Maka dari itu kekayaan yang dipercayakan dikelola dengan baik. Dengan mempertanggungjawabkan semua kinerjanya dalam laporan yang materiil dengan melaporkan laporan keuangan perbankan.

- Satu-satunya yang berkuasa adalah Allah SWT

Di Islam, mutlak dan abadi pemilik segala apa yang di bumi dan di akhirat, milik Allah SWT, Mahakuasa, dan kita manusia hanya wali atas apa yang dikuasai-Nya. Begitu juga di perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip islam yang berarti juga sebagai wali atas pemilik segala, sehingga memiliki kewajiban untuk amanahnya. Pengelola utama dari perbankan adalah Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga terdapat surat pernyataan dan bertanggungjawab atas kinerjanya dalam mengelola perbankan.

- Masyarakat sebagai pemangku kepentingan
Perbankan memiliki tanggung jawab secara vertikal maupun horizontal. Tanggung jawab secara horizontal bisa kepada pemangku kepentingan yang transparansi dalam informasi yang material sehingga masyarakat bisa membuat keputusan dari informasi yang disajikan seperti laporan remunerasi dewan komisaris dan direksi.
- Akuntabilitas tidak hanya untuk stakeholders tapi juga untuk Allah SWT, pemilik utama
Keadaan untuk mempertanggungjawabkan kepada stakeholders dan Allah setiap organ bank syariah. Pelaksanaannya dalam akuntabilitas dalam Good Corporate Governance.

3. Perlakuan wajar shareholders/pemegang saham

- Adil dan wajar dalam nilai
Allah mengetahui segala sesuatu dan siapapun yang menyembunyikan, Allah memiliki perhitungan sendiri pada hari penghakiman. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan keseimbangan memiliki implikasi yang mendalam untuk menjalankan bisnis syariah. Maka setiap pemegang saham harus diperlakukan dengan adil dan wajar. Pelaksanaan dapat dalam melaksanakan RUPS yang sebelumnya pemegang saham mendapat informasi yang tepat dan akurat sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam RUPS

- Distribusi adil kekayaan untuk semua stakeholders dan anggota bukan menghasilkan keuntungan dalam bentuk zakat dan sadaqoh

Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam. Zakat dan sadaqah adalah bentuk rasa syukur atas kepercayaan Allah atas kekayaan yang diwakilkan kepada pemegang saham.

- Kekayaan sosial dan individual bersama keduanya melakukan kewajiban spriritual dan moral

Setiap muslim memiliki kewajibannya atas amanah yang diberikan. Sebagai salah satu bentuk kewajibannya adalah dengan bersyukur atas kepercayaan yang sudah diberikan yaitu berkaitan dengan spiritual dengan pengungkapan pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah seta kewajiban moral untuk sesama dengan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti dalam CSR

- Sensasi persamaan hak

Allah mengetahui segala sesuatu dan siapapun yang menyembunyikan, Allah memiliki perhitungan sendiri pada hari penghakiman. Maka dengan jelas bahwa dalam perbankan terdapat penjelasan setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

4. Peranan stakeholders di tata kelola

- Akuntabilitas islam untuk falah dan berorientasi kekayaan sosial

Akuntabilitas adalah pertama-tama kepada Allah. Konsep dasar akuntabilitas Islam diyakini bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu dalam bentuk kepercayaan. Pengungkapan sebenarnya dari fakta-fakta untuk keseluruhan yang bersifat sosial adalah cara dalam bentuk pengungkapan laporan CSR.

- Perbedaan/pembelahan diantara haram halal

Lewis dalam Abu-Tapanjeh (2009) menunjukkan di sini bahwa, "Islam selalu mendorong perdagangan dan perdagangan selama itu dilakukan dalam

kerangka Al-Qur'an, dan firman Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad (saw).” Dalam pembeda dengan non syariah bisa ditunjukkan dalam laporan keuangan yang terdapat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang dipublikasikan.

- Kekayaan sosial dan individuual bersama keduanya melakukan spriritual dan material

Setiap muslim memiliki kewajibannya atas amanah yang diberikan. Pihak perbankan memberikan dampak bagi stakeholders dengan adanya kegiatan-kegiatan yang juga sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab kepada stakeholders seperti dibidang usaha.

- Pertimbangan untuk keseluruhan komunitas

Muslim yang baik adalah muslim yang bisa bermanfaat bagi sesama. Perbankan juga harus memberikan manfaat sesama untuk meningkatkan kualitas stakeholders yang bisa melalui dalam organisasi / komunitas di masyarakat. Untuk mempermudah hal tersebut ditingkatkan kualitas IT perbankan.

5. Penyimpangan dan transparansi

- Akuntabilitas dengan pemenuhan syariah

Akuntabilitas adalah pertama-tama kepada Allah. Konsep dasar akuntabilitas Islam diyakini bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu dalam bentuk kepercayaan. Pengungkapan maka sebenarnya dari fakta-fakta mengenai penyimpangan dan transparansi dengan adanya komite audit yang memeriksa untuk menghindari penyimpangan dan menjaga untuk tetap terbuka atas informasi yang material dan relevan.

- Tujuan keterkaitan sosial ekonomi untuk kontrol perusahaan dan akuntabilitas untuk semua stakeholders yang berhak

Muslim diarahkan untuk melakukan bisnis mereka sesuai dengan aturan Syariah, yaitu menjadi adil, jujur dan wajar terhadap yang lain baik dari sisi

sosial maupun ekonomi. Hal ini menghindari adanya ketidakseimbangan para pemangku kepentingan. Dalam perbankan diungkapkan rasio gaji tertinggi dan terendah.

- Peradilan, persamaan hak, transparansi kondisi sebenarnya

Peradilan, persamaan hak dan transparansi adalah wujud bank syariah kepada pemegang kepentingan dan pemegang saham. Pengungkapan keterbukaan bank akan menunjukkan peradilan dan persamaan hak.

- Akuntabilitas yang lebih luas dengan mengambil maupun penyimpangan secara lisan

Keterbukaan adalah hal yang harus dilakukan perbankan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satunya dalam hal penyimpangan yang terjadi. Pengungkapan penyimpangan baik penyimpangan internal maupun permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh pihak bank.

6. Pertanggungjawaban dewan

- Akuntabilitas tidak hanya untuk perusahaan atau dewan atau stakeholders tapi juga untuk Allah SWT kekuasaan tertinggi dimana memimpin untuk kekayaan dan kesuksesan

Akuntabilitas adalah pertama-tama kepada Allah. Konsep dasar akuntabilitas Islam diyakini bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu dalam bentuk kepercayaan. pengungkapan maka sebenarnya dari fakta-fakta dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah dalam laporan pertanggungjawabannya dalam setiap periode.

- Keseluruhan dan petunjuk integratif

Muslim sebagai khalifah di bumi diberikan kepercayaan oleh Allah SWT sehingga harus menjaga kekayaan yang sudah diwakilkan. Dalam bank menjaga kekayaan dengan melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dan membuat perencanaan dan kemungkinan yang terjadi, dikarenakan banyak

resiko yang akan terjadi maka dalam bank terdapat komite pemantau resiko.

- Negosiasi dan kooperasi

"hidup benar dalam konsultasi bersama dan kesabaran, dan bergantung pada Allah. Islam mendorong peserta untuk bekerja sama secara bebas dan terang ketika tiba di keputusan (Shaikh dalam Abu-Tapanjeh, 2009). Pihak bank membutuhkan pihak lain dalam membanu melaksanakan negosiasi maupun kooperasi.

- Konsultasi dan pencarian kesepakatan umum untuk keputusan satu sama lain dengan terkait/seasal stakeholders

"Dan berkonsultasi dengan mereka dalam urusan (saat). Kemudian, apabila kamu telah mengambil keputusan, bertawakal kepada Allah "(Al-Imran 3,159). "Mereka yang menanggapi Tuhan mereka dan mendirikan shalat; yang melakukan urusan mereka dengan konsultasi bersama; yang menghabiskan dari apa yang kita berikan pada mereka untuk rezeki "(ash Syura, 42,38). Dalam perbankan syariah terdapat rapat umum setiap tahun dan rutin dilaksanakan sebagai bentuk konsultasi bersama.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel-variabel penelitian	Hasil (Kesimpulan)
1.	Kaihatu (2006)	Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia	GCG, GCG principles, organization culture, application in Indonesia.	Korporate kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi
2.	Junusi (AICIS XII)	Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah	Islamic governance, reputation, trust, Islamic banks	Implementasi menunjukkan bahwa Syariah Governance pada bank syariah (Bank Muamalat) sudah dilaksanakan dengan baik. Dari masing-masing indikator syariah governance, menunjukkan bahwa syariah compliance merupakan indikator yang memberi kontribusi terbesar
3.	Arani (2010)	Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri	Good corporate governance	<ul style="list-style-type: none"> – Penerapan prinsip GCG pada PT. Bank Syariah Mandiri sudah baik, – Kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan rasio rentabilitas (profitabilitas) yang meliputi ROA dan ROE, pada setiap tahunnya meningkat. – Dari hasil perhitungan analisis kolerasi Rank Spearman positif terhadap kinerja keuangan
5.	Tapanjeh (2007)	Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles		keberhasilan dan kesejahteraan diukur dengan kewajiban spiritual moral dan etika dengan kepercayaan yang kuat dalam akuntabilitas dengan Allah, otoritas tertinggi.

Sumber : Data diolah

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif kontruksi yang menggabungkan prinsip Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance.

3.2 Unit Analisis

Objek penelitian dari penelitian ini adalah perbankan yang terdapat dalam penelitian yang sedang diselidiki. Dari masalah yang diangkat, maka maksud dari objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam penerapan Islamic Corporate Governance.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan tidak secara langsung, namun melalui dokumen yang terdapat dalam website resmi dari Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen dalam bentuk tulisan. Dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah dokumen berupa laporan pelaksanaan Good corporate governance dan annual report yang dipublikasikan dalam website resmi dari Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

3.4 Uji Keabsahan Data

1. Uji kredibilitas;

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang digunakan adalah dengan peningkatan ketekunan dan penggunaan bahan referensi. Peningkatan ketekunan dalam penelitian ini dengan cara memeriksa data yang ditemukan

benar atau tidak dalam setiap analisis dengan tetap cermat dan berkesinambungan dikaitkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan temuan yang diteliti. Penggunaan bahan referensi dapat berupa laporan GCG maupun laporan keuangan konsolidasi yang dilampirkan sebagai bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan.

2. Uji Transferability

Pengujian Transferability dalam penelitian ini dengan memberikan penjelasan dan saran yang dijelaskan secara rinci, jelas, dan memberikan alasan yang dapat dipercaya untuk digunakan dalam perbankan syariah dari obyek lain penelitian sesuai dengan hasil penelitian

3. Uji dependability;

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan dengan cara peneliti merekam setiap proses penelitian sehingga jejak aktivitas penelitian dapat diketahui. Adanya data yang dapat menjelaskan hasil dalam setiap proses yang menjadikan penelitian ini tidak diragukan.

4. Uji confirmability.

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Dalam penelitian ini, proses yang dilakukan oleh peneliti dapat ditelusuri dengan melihat jejak aktivitas peneliti. Hasil yang ada dalam penelitian karena ada proses yang ada pula sehingga ada alasan dalam setiap hasil.

3.5 Metode Analisis Data

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

a. Collection Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari website resmi dari Bank Mandiri

Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah maupun data dari pemerintah terkait pelaksanaan Good Corporate Governance.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Merangkum dan memilih data yang sudah diperoleh dengan kebutuhan dalam penelitian. Dalam pemilihan data tersebut dicari pola yang dibutuhkan dalam keterkaitan dengan kedua prinsip dan pelaksanaannya dalam ketiga bank syariah, sehingga dapat mengetahui pola untuk setiap dokumen.

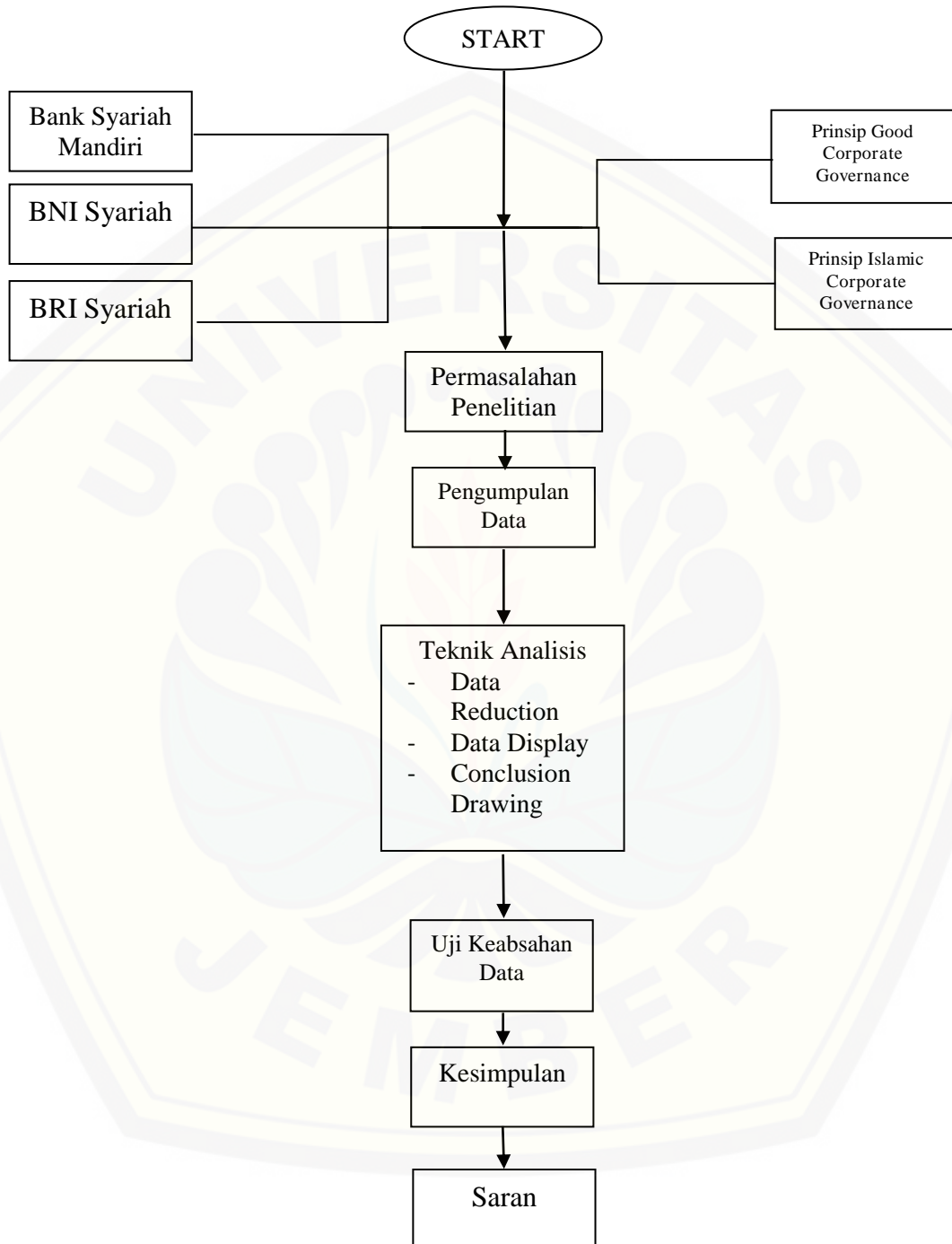
c. Data Display (Penyajian Data)

Menyesuaikan poin-poin dalam pelaksanaan Good Corporate Governance dengan prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan peraturan SEBI 12/13/DPbS lalu dinilai dengan prinsip Islamic Corporate Governance dan bagaimana analisis penggabungan kedua prinsip tersebut terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance yang sudah dilaporkan.

d. Conclusion Drawing / Verification

Menyimpulkan hasil dari analisis prinsip Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance terhadap penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance yang sudah dilaporkan.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang merujuk pada prinsip berdasarkan perspektif Islam dari penelitian Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah melaksanakan Islamic Corporate Governance walaupun dalam laporan Good Corporate Governance belum memenuhi keseluruhan. Ada 9 poin dalam Islamic Corporate Governance yang belum memenuhi, namun hal tersebut sudah terpenuhi dalam laporan tahunan BSM.
2. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sudah melaksanakan Islamic Corporate Governance walaupun dalam laporan Good Corporate Governance belum memenuhi keseluruhan. Ada 9 poin dalam Islamic Corporate Governance yang belum memenuhi, namun hal tersebut sudah terpenuhi dalam laporan tahunan BNIS.
3. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) sudah melaksanakan Islamic Corporate Governance walaupun dalam laporan Good Corporate Governance belum memenuhi keseluruhan. Ada 12 poin dalam Islamic Corporate Governance yang belum memenuhi, namun hal tersebut sudah terpenuhi dalam laporan tahunan BRIS.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan belum mewakili dari seluruh bank syariah yang ada di Indonesia, hanya pada BSM, BNIS dan BRIS.

5.3 Saran

1. Bagi BSM, BNIS dan BRIS dapat menambahkan dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance poin yang belum terpenuhi sehingga juga dapat melaksanakan Islamic Corporate Governance.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan tidak hanya menggunakan satu konsep dari Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, namun bisa ditambahkan dari beberapa konsep lainnya.
3. Penelitian ini bisa juga dikembangkan dengan menambah obyek penelitian dan tidak hanya pada BSM, BNIS dan BRIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud. Corporate Governance from the Islamic Perspective A Comparative Analysis with OECD Principles. Critical Perspective on Accounting 20 (2009) 556-567.
- Al Qur'an. Alquran mushaf terjemahan. Jakarta :Penerbit Jabal
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. Bank Syariah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arani, Desna. Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri. 2010.
- Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- , 2010. Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPbS.
- Bank Negara Indonesia Syariah. 2014. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2014.
- , 2014. Laporan Tahunan 2014.
- Bank Syariah Mandiri. 2014. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 2014 PT Bank Syariah Mandiri.
- , 2014. Laporan Tahunan 2014.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. 2014. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Bank BRISyariah.
- , 2014. Laporan Tahunan 2014.
- DSN MUI. 2016. Sekilas DSN MUI. www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas. 28 Desember 2016
- Fadilah, Sri Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance (Studi pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh 21 - 22 Juli 2011.

Junusi, Rahman El. Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII).

Kaihatu, Thomas S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal. Vol 8. No 1, Maret :1-9.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.

Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University Press.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BSM

**DAFTAR KONSULTAN/VENDOR, PENASIHAT ATAU YANG DIEPERSAMAKAN DENGAN ITU
YANG DIGUNAKAN OLEH PT BANK SYARIAH MANDIRI**

a. Konsultan Hukum

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1	Kantor Hukum Hans Hidayat & Partners	Menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang	Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonvensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa	Dalam proses
2	Kantor Hukum Martiri DL & Associates	Pelaporan kepada pegawai yang fraud di KC Rantau Prapat dan penanganan perkara perdata di Mahkamah Agung RI	Melakukan pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud kepada Kepolisian RI, mendampingi pegawai yang memberikan kesaksian, melakukan koordinasi dengan para Penyidik/ Penyidik/ Penuntut Umum, menyediakan Legal Memorandum kepada BSM, menjaga kerahasiaan Bank. Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonvensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa, menyampaikan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI	Dalam proses
3	Kantor Hukum W. Abdillah & Partners	Menangani perkara perdata di Pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Tinggi Banten	Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonvensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa, menyampaikan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi	Dalam proses
4	Kantor Hukum Marwan Kusia & Partners	Menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Manado	Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonvensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa	Dalam proses
5	Kantor Hukum Yustitia Indonesia	Menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Bitar	Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonvensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa	Dalam proses
6	Kantor Hukum Syahriza, SH &	Menangani perkara perdata di Pengadilan	Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan	Dalam proses

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
	Rekan	Negeri Meulaboh	Jawaban, rekonsensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa	
7	Kantor Hukum Mustari Mukhtar, SH & Partners	Menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Sigli	Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonsensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa	Dalam proses
8	Kantor Hukum Hermahanto, SH., MH & Partners	Menangani perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Menghadiri mediasi, sidang-sidang, membuat dan menyerahkan jawaban, rekonsensi, duplik, bukti-bukti, kesimpulan kepada majelis yang memeriksa, menyampaikan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi	Dalam proses
9	Kantor Hukum Triawan Kuslia & Partners	Menangani perkara di Peradilan Militer	Melakukan pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud kepada Kepolisian RI, mendampingi pegawai yang memberikan kesaksian, melakukan koordinasi dengan para Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum, menyediakan Legal Memorandum kepada BSM, menjaga kerahasiaan Bank	Dalam proses
10	Kantor Hukum Widiani-Sulistiono & Partners	Pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud di KCP Bogor Jalan Baru dan penanganan perkara perdata PT Atrumasta Sakti	Melakukan pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud kepada Kepolisian RI, mendampingi pegawai yang memberikan kesaksian, melakukan koordinasi dengan para Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum, menyediakan Legal Memorandum kepada BSM, menjaga kerahasiaan, menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi	Dalam proses
11	Kantor Hukum Syalfu Ma'arif & Partners	Pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud di KC Mamuju, KC Kediri, dan KCP Brebes	Melakukan pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud kepada Kepolisian RI, mendampingi pegawai yang memberikan kesaksian, melakukan koordinasi dengan para Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum, menyediakan Legal Memorandum kepada BSM, menjaga kerahasiaan Bank	Dalam proses
12	Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners	Pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud di KCP Tanjung Enim dan KCP Lubuk Lihgau	Melakukan pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud kepada Kepolisian RI, mendampingi pegawai yang memberikan kesaksian, melakukan koordinasi dengan para Penyelidik/Penyidik/Penuntut Umum, menyediakan Legal Memorandum kepada BSM, menjaga kerahasiaan Bank	Dalam proses
13	Kantor Hukum Ramil Tarigan & Partners	Pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud di KC Medan Gajah	Melakukan pelaporan kepada pegawai yang melakukan fraud kepada Kepolisian RI, mendampingi pegawai yang memberikan	Dalam proses

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
		Mada	kesaksian, melakukan koordinasi dengan para Penyelidik/Pyenyidk/Penuntu Umum, menyediakan Memorandum kepada BSM, menjaga kerahasiaan Bank	
14	Kantor Hukum Karimsyah & Partners	Review Akad-Akad	Mereview Akad-Akad	Dalam proses

b. Konsultan/vendor Informasi Teknologi (IT)

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1	PT Artha Mitra Interdata	Manajemen <i>bandwidth</i>	Solusi <i>hardware</i> jaringan	
2	PT Aplikanusa Lintasarta	Provider Jaringan komunikasi	Solusi jaringan komunikasi data	
3	PT Anabatic Technologies	System Implementasi Core Banking System	Solusi Implementasi Software CBS	
4	PT Anugrah Damal Pratama Solusi	Manajemen <i>security</i>	Solusi Implementasi SSL	
5	PT Astra Graphia Information Technology	Manajemen keamanan jaringan	Solusi penyediaan tools IT Security LANdesk	
6	PT Artacomm Indotama	Manajemen <i>bandwidth</i>	Solusi <i>hardware</i> jaringan	
7	PT. Artajasa	Provider jaringan ATM	Solusi jasa jaringan e-channel	
8	PT Cipta Teknologi Indonesia	Penyediaan layanan <i>harddisk</i>	Solusi layanan penyewaaan <i>storage</i>	
9	PT Dymar Jaya Indonesia	Manajemen e-channel	Solusi <i>Host Security Module</i> e-channel	
10	PT Digital Mind System	Layanan transaksi dan data Consumer Loan	Solusi software LOS	
11	PT Eka Bakti Amerita Yoga Sejalera	Penyedia layanan pembayaran	Solusi e-channel Transfer Tunai PT POS	
12	PT Finnet Indonesia	Penyedia layanan pembayaran dan Pajak	Solusi e-channel Telkom payment & MPN Gen 2	
13	PT. Firstwap	Layanan SMS Internal BSM	Solusi layanan SMS	
14	PT Hewlet Packard Indonesia	Penyediaan <i>hardware</i> CBS	Solusi penyediaan perangkat server	

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
15	PT Intell Solusindo	Manajemen keamanan sistem AS/400	Solusi jasa security AS/400	
16	PT Indonesia Satellite (Indosat) Tbk	Provider jaringan komunikasi	Solusi jaringan komunikasi data	
17	PT Indonesia Comnets Plus	Provider Jaringan komunikasi	Solusi jaringan komunikasi data	
18	PT Indonesia Market Quote (IMQ) - ELO	Layanan dokumen manajemen	Solusi software Document Management System ELO	
19	PT Infosys Solusi Terpadu	Layanan data capture CIF	Solusi software Data Capture	
20	PT Jatelindo Perkasa Abadi	Penyedia layanan pembayaran	Solusi e-channel Netbanking dan MBG	
21	PT Payment Solution Ind (Integra Pratama)	Sistem layanan transaksi elektronik	Solusi sistem EDC	
22	PT Makara Mas	Layanan transaksi	Solusi transaksi host to host	
23	PT Mastersystem Infotama	Manajemen jaringan	Solusi hardware jaringan	
24	PT Master Web	Manajemen jaringan Internet	Security Internet	
25	PT Mitra Integrasi Informatika	Manajemen layanan server dan platform	Solusi hardware server dan platform Microsoft	
26	PT Mitracomm Ekasarana	Penyedia layanan pembayaran	Solusi e-channel SMS banking	
27	PT Metalogix Infolink Persada (X/Link)	Layanan transaksi e-channel	Solusi e-channel	
28	PT Microsoft Indonesia	Penyedia platform CBS dan PC	Solusi software/ platform Microsoft	
29	PT Multipolar, Tbk	Provider perangkat PC	Solusi penyediaan perangkat komputer	
30	PT Mumi Solusindo Nusantara	Sistem data capture killing	Solusi software SKN	
31	PT Netwave Multimedia	Sistem layanan transaksi micro finance	Solusi software LKMS	
33	PT NCR Indonesia	Manajemen layanan e- channel	Maintenance ATM	
34	PT Packet System Indonesia	Manajemen keamanan Internet	Solusi hardware security	
35	PT Palung Datasys	Manajemen layanan outsourcing programmer	Solusi manajemen outsourcing programmer migrasi CBS	

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
36	PT Proweda Ciptakarsa Informatika	Layanan transaksi RTGS	Instalasi backup RTGS	
37	PT Prodata Sistem Teknologi	Manajemen layanan anti virus	Solusi anti virus	
38	PT Qwards Company International	Manajemen jaringan Internet	Security Internet	
39	PT Rintis Sejahtera	Penyedia layanan pembayaran	Solusi e-channel ATM Prima	
40	PT Simlan Solutions	Layanan transaksi reksadana	Solusi software reksadana	
41	PT Sigma Cipta Caraka	Penyedia layanan data center dan legacy core banking system	Solusi penyediaan Data Center dan Alphabit Sharia	
42	PT Sisindokom Intasbuana	Sistem RTGS	Pengelolaan lisensi Oracle	
43	PT Systech Global Informasi	Manajemen jaringan Internet	Penetrasi tes berbasis web	
44	PT Small Data global	Manajemen layanan helpdesk internal BSM	Solusi manajemen Helpdesk	
45	PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	Provider layanan komunikasi	Solusi jaringan komunikasi data dan suara	
46	PT Trengginas Daya Insani	Maintenance AS/400 dan hardware RTGS	Solusi perawatan AS400	
47	PT Starlink Solusi	Penyedia layanan pembayaran	Solusi e-channel PLN payment	
48	Temenos Singapore PTE LTD	Penyedia sistem Core Banking System	Solusi penyediaan software Core Banking System	
49	PT Tribangun Usaha Persada	Manajemen power supply	Penyediaan UPS	
50	PT Visionet Internasional	Maintenance server	Solusi perawatan server	
51	PT Venturum System Indonesia	Layanan transaksi payment	Solusi IFTI	
52	Western Union FSI	Penyedia layanan pembayaran	Solusi e-channel Western Union	
53	PT XL Axiata	Penyedia layanan pembayaran	Solusi e-channel XL payment	
54	PT Links	Revitalisasi Mobile Banking	Penambahan platform dan menu baru pada Mobile Banking	

c. Konsultan/vendor pelatihan

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1	Inventure	Pelatihan Branch Manager Improvement Training: Data Gathering	Jasa pengajar, kurikulum dan materi pelatihan	
2	Tandika	Pelatihan Area Sales Management	Jasa pengajar, kurikulum dan materi pelatihan	
3	PT Mitra Pembelajar	Pelatihan Writing Skill Training For Policy And Procedure	Jasa pengajar, kurikulum dan materi pelatihan	
4	Learning Resource	Pelatihan Front Liners	Jasa pengajar, kurikulum dan materi pelatihan	
5	Wardah	Pelatihan Banking Staff Program for Frontliners	Jasa pengajar, kurikulum dan materi pelatihan	
6	MAPPI	Pelatihan Sertifikasi Penilai Agunan	Jasa pengajar, kurikulum dan materi pelatihan	
7	Parsley Catering	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan makanan pelatihan	
8	Morasari Catering	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan makanan pelatihan	
9	Pondok Gemes	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan makanan pelatihan	
10	Kaila Catering	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan makanan pelatihan	
11	AM Photography	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan jasa dokumentasi pelatihan	
12	PT Tri Pesona Komunika	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan jasa dokumentasi pelatihan	
13	Accor Group	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan akomodasi pelatihan	
14	Aston Group	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan akomodasi pelatihan	
15	CV Fajar Timur	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan modul & backdrop pelatihan	
16	RH Pro Rent	Penyediaan fasilitas pelatihan	Penyediaan sewa laptop, printer & peralatan digital pelatihan	

d. Konsultan terkait kegiatan operasional

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup kerja	Keterangan
1	PT Marketing Konsultan Prima	Mengukur Kualitas Layanan Cabang	Seluruh Kantor Cabang meliputi Frontliners dan tangible	
2	PT Murni Solusindo	Menjaga SLA warkat kilring	Maintenance perangkat dan software	Menjalankan proses

				pemilahan warkat setiap sore hari
3	PT Decillon	Sarana komunikasi/traffic finance maupun non finance	Layanan remittance, trade service	

e. Konsultan/vendor lainnya

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1	PT Anabatic Technologies	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
3	PT Anugrah Damai Pratama	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
5	PT Artha Mitra Interdata	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
7	PT Astra Graphia Information Technology	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
9	PT Cipta Teknologi Indonesia	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
11	PT Decillion Solutions	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
13	PT Diebold Indonesia	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
15	PT Digital Mind System	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
17	PT Dymar Jaya Indonesia	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
19	PT First Wap	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
21	PT Infosys Solusi Terpadu	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
23	PT Insight Consulting	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
25	PT Integrasi Prima Logika	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
27	PT Intell Solusindo	Penyediaan jasa Informasi dan	Jasa Informasi dan Teknologi	

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
		Teknologi		
29	Luxand, Inc	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
31	PT Mastersystem Infotama	Penyediaan jasa Informasi dan Teknologi	Jasa Informasi dan Teknologi	
33	AM Photography	Penyediaan jasa Photography	Jasa Photography	
35	PT Tripesona	Penyediaan jasa Photography	Jasa Photography	
37	PT Auvikomunikasi Mediapro	Promosi	Jasa Iklan	
39	PT Asta Atria Surya	Promosi	Jasa Iklan	
41	PT Idea Expo Komunika (De a Team)	Promosi	Jasa Iklan	
43	PT Indonesia Media Network	Promosi	Jasa Iklan	
45	PT Lativi Media Karya (TV One)	Promosi	Jasa Iklan	
47	PT Lumbung Riang Communication	Promosi	Jasa Iklan	
49	PT Media Golfindo (Golf Digest)	Promosi	Jasa Iklan	
51	PT Media Network Wahana	Promosi	Jasa Iklan	
53	Aris Wijaya	Jasa Penerjemah	Jasa Penerjemah	
55	PT Binaman Utama	Jasa Konsultan	Jasa Konsultan	
57	PPM Manajemen	Jasa Konsultan	Konsultan SDM	
59	PT Mitra Arta Vidya	Jasa Konsultan	Konsultan SDM	
61	PT Nusa Mana Reka	Jasa Konsultan	Jasa Konsultan	
63	PT Para Duta Bangsa	Jasa Konsultan	Konsultan SDM	
65	Ruslanl Documentary	Jasa Konsultan	Jasa Konsultan	
67	PT Sarana Exhirindo	Jasa Konsultan	Jasa Konsultan	
69	PT Deka Citra International	Jasa Riset	Jasa Riset	
71	PT Kadence International	Jasa Riset	Jasa Riset	
73	PT Marketing Sentratama Indonesia	Jasa Riset	Jasa Riset	
75	PT Markplus Indonesia	Jasa Riset	Jasa Riset	

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
77	PT Marsindo Konsult Prima	Jasa Riset	Jasa Riset	
79	PT Pelita Layanan	Jasa Riset	Jasa Riset	
81	PT Ranata Air Network	Jasa Riset	Jasa Travel	
83	CV Tri Putra Mitra Selaras	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
85	PT Dihar Barokah	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
87	CV Tiqa Pilar Sejahtera	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
89	CV Benue Alue	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
91	PT Citra Perdana Muda	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
93	PT Prastiwahyu Mitra Sejahtera	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
95	PT Bumi Daya Plaza	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
97	PT In Griya Cita Anugerah	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
99	PT Cipta Griya Indah	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
101	CV Dian Karta Sejati	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
103	PT Adhistana Graha Mandiri	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
105	PT Estika Yasakelola	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
107	CV Mulang karta Sejati	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
109	CV Griya Mumpuni	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
111	CV Mitra Bank	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
113	PT Karya Perdana Baru	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
115	PT Galaxy Interindo	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
117	PT Laras Gatra	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
119	CV Zahara Tekhnik	Jasa Kontraktor	Renovasi Gedung	
121	PT. Caturkarya Gemaswadaya	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Lemari Arsip, Filling Cabinet Lion, dan Rak	
123	PT. Lion Metal Workis Tbk	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Lemari Arsip, Filling cabinet (besi), rak	
125	PT. Cakratama Perdana	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Televisi, Cashbox, Lemari Arsip, Filling Cabinet dan Rak, Telepon	
127	PT. Elkanusa Sanggadata	Penyedia sarana dan prasarana kantor	UPS, Stabilizer, dan IT Transformer	

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
129	PT Datascrip	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Lemari Kaca Sliding, Kertas, ATK, Scanner, Lemari Locker, Cardex, Lemari besi File, rak besi	
131	PT United Teknologi Integrasi (UTI)	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Netbook, Notebook, Voice recorder, Televisi, ATK Lainnya, Camera, Hardisk Drive	
133	PT Asia Pasific True Trust	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Mesin Hitung Uang, Detektor Valas	
135	PT Harya Pilar Utama Sukses	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Projector, Mesin Antrian dan Papan Antrian, Printer Multifunction (Epson L200), LTO (Kabel)	
137	PT. Reza Prima	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Promo dan Cetak	
		Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Kantong Dok. Pembayaan, Aplikasi Tab. Berencana	
138	CV. Zebe Indo Pratama	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Promo dan Cetak (Spanduk & Brosur Valas, Form aplikasi net banking)	
139	PT. Pelangi Kreasi	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Promo	
140	Kriya Nusantara Group	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Promo Item	
141	PT Geger Berkarya	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Cetak dan Promo Kulit	
142	PT. Gerbang Cipta Kreasi	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Cetak	
143	PT. Beringin Kencana Jaya	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Cetak: Form Aplikasi Net Banking, Compliment Direksi, Buku RBB 2012	
144	Gamedia Printing Group	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Barang Cetak: Butab Rupiah Reguler	
145	PT Globe Intertrans	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Jasa Sewa Kendaraan	
146	PT Serasi Auto Raya (Trac Rent Car)	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Jasa Sewa Kendaraan	
147	PT Takari Kokoh Sejahtera	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Jasa Sewa Kendaraan	
148	PT Asiapacific True Trust	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Penyedia Mesin Kantor	
149	PT Mitra Sarana Langgeng Utama	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Penyedia Mesin Kantor	
150	PT Banyupenta Maskom Wijaya	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Penyedia Mesin Kantor	
151	PT Ingenico International Indonesia	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Penyedia Mesin Kantor	
152	PT Esa Krida Utama	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Penyedia ATK dan mesin kantor	
153	PT Lion Metal Works TBK.	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Penyedia peralatan kantor dari besi	
154	PT Lentera Mandiri Perkasa	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Item promosi	

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
155	Real Adventure Store	Penyedia sarana dan prasarana kantor	Item promosi	
156	PT Duta Utama Abadi	Penyedia sarana dan prasarana kantor	penyedia ATK	
157	PT Blno Artomas	Penyedia sarana dan prasarana kantor	penyedia ATK	
158	PT Kallmata Raya Multi	Penyedia sarana dan prasarana kantor	penyedia ATK	
159	PT Dalindo Intonet	Penyedia sarana dan prasarana kantor	penyedia ATK	
160	Toko Senang Hati	Penyedia sarana dan prasarana kantor	penyedia ATK	
161	PT Air Mas Perkasa	Penyedia sarana dan prasarana kantor	penyedia ATK	

Lampiran 2. Rincian Penyaluran Dana BSM

No	Tanggal	Keterangan	Penyaluran (Rp)
1	10 Januari 2014	Sumbangan acara Indonesia Social Investment Forum	5.000.000,00
2	13 Januari 2014	Bantuan dana temu kangen keluarga besar eks BGD	5.000.000,00
3	21 Januari 2014	Bantuan kegiatan talk show dalam rangka Hari Ibu	3.000.000,00
4	22 Januari 2014	Sumbangan kegiatan peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah di Monas 17112014	100.000.000,00
5	24 Januari 2014	Bantuan sosialisasi dan perencanaan Gerakan Ekonomi Syariah	7.200.000,00
6	29 Januari 2014	Bantuan penerbitan buku ekonomi syariah seluruh siswa SLTA	5.000.000,00

No	Tanggal	Keterangan	Penyaluran (Rp)
7	30 Januari 2014	Bantuan pengadaan sarana air bersih Masjid Al Ikhlas Garut	7.500.000,00
8	05 Februari 2014	Bantuan sosialisasi dan pencanangan Gerakan Ekonomi syariah	10.000.000,00
9	05 Februari 2014	Pembelian buku Sakinah tahap II	5.000.000,00
10	11 Februari 2014	Bantuan biaya sosialisasi Gres KC Aceh	10.000.000,00
11	12 Februari 2014	Bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi IPB, tahap 2	500.000,00
12	12 Februari 2014	Bantuan sosialisasi Gress KC Malang	5.000.000,00
13	12 Februari 2014	Bantuan sosialisasi Gress KC Padang Sidempuan	5.000.000,00
14	17 Februari 2014	Dana CSR bersama BI dan Perbankan syariah	5.000.000,00
15	27 Februari 2014	Bantuan sosialisasi dan pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah	7.200.000,00
16	28 Februari 2014	Bantuan sosialisasi dan pencanangan Gres	5.000.000,00
17	24 Maret 2014	Bantuan sosialisasi dan pencanangan Gres Regional Office I	20.000.000,00
18	05 Mei 2014	Bantuan dana program bakti sosial IB Working Group IB Vaganza 2014	5.000.000,00
19	07 Mei 2014	Bantuan dana untuk kegiatan muskemas ASBISINDO 2014	75.000.000,00
20	13 Mei 2014	Bantuan untuk pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Al Quran Yayasan Majelis Al Washhyah	300.000.000,00
21	14 Mei 2014	Bantuan kegiatan workshop Solusi Hisab dan Rukyat	50.000.000,00
22	17 Juni 2014	Bantuan pembangunan Mushalla At Taubah Bojonegoro	3.000.000,00
23	01 Juli 2014	Bantuan pembangunan Madrasah Diniyyah Awwaliyah Bustanu Ulum	10.000.000,00
24	05 Agustus 2014	Bantuan kegiatan sosial Persatuan Isteri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Jakarta Raya	25.000.000,00
25	05 Agustus 2014	Pembayaran band Prada Band Acara Mudik bareng BSM 2014	3.000.000,00
26	29 Agustus 2014	Bakti Sosial korban bencana gunung Kelud Jawa Timur	44.996.897,00
27	29 Agustus 2014	Pengadaan Instalasi air bersih Mushalla Syariah di Bromo	242.361.300,00

Lampiran 3. Hasil Self Assesment

No	Parameter Penilaian	Structure	Process	Outcome	Penjelasan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,29	1,55	2,38	Komisaris telah menjalankan fungsinya dengan baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,13	1,72	2,29	Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1,20	1,86	2,00	Seluruh Komite telah lengkap dan menjalankan fungsinya dengan baik
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1,13	1,55	1,60	Tugas dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah telah berjalan dengan baik
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2,17	2,50	2,00	Perlu dilakukan peningkatan kualitas pemenuhan prinsip syariah melalui pelatihan dan sosialisasi prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	2,00	2,00	1,00	Tidak terdapat benturan kepentingan di BRISyariah dalam aktivitas sehari-hari
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	2,00	2,00	1,50	Penerapan budaya kepatuhan mengalami perbaikan melalui pembentukan BQA (Branch Quality Assurance) di Cabang
8	Penerapan fungsi audit Intern	2,25	2,36	2,25	Fungsi Audit Intern telah berjalan baik
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1,00	1,00	1,00	Fungsi Audit Ekstern telah berjalan sangat baik
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	2,00	1,67	2,00	BMPD terkontrol dan termonitor baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2,00	1,57	1,86	Bank telah melakukan transparansi dan pengungkapan laporan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan berlaku
Total Nilai Parameter		1,65	1,80	1,81	
Bobot Penilaian Parameter		40%	30%	30%	
Nilai Penilaian GCG Akhir		1,74 (Baik)			

Lampiran 4. Daftar Konsultasi, Penasehat atau yang dipersamakan dengan itu oleh BRIS

PT. Bank BRISyariah
Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu
Tahun 2014

No.	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan Kerja	Ruang Lingkup Kerja
1.	KAP Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Audit Laporan Keuangan 2014 BRIS	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. - Menerbitkan ringkasan komentar, rekomendasi dan tanggapan manajemen jika ada. - Review PSAK 50 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011)
2.	KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Audit SKAI dan SPI BRIS	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa dan mereview pelaksanaan audit SKAI BRISyariah telah ditetapkan sesuai dengan standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang diatur dalam PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999. - Memeriksa dan mereview sistem pengendalian dan audit intern atas penyelenggaraan teknologi informasi sesuai dengan PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007. - Penilaian mengenai sistem metode kerja SKAI BRIS mulai dari perencanaan audit sampai dengan monitoring tindak lanjut temuan audit. - Penilaian mengenai tata cara dan proses pelaksanaan audit di lapangan antara lain mengenai jumlah sampling, jumlah cabang yang di audit dan pelaksanaan on the spot ke nasabah. - Penilaian mengenai dasar pemberian rating cabang dan laporan hasil audit. - Penilaian mengenai kegiatan quality assurance dan monitoring hasil audit.

3.	CV. Gamacom Tritama	Konsultasi dan maintenance efisiensi penggunaan telepon dan PABX	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan pekerjaan Konsultan Tagihan Penggunaan Telepon dan maintenance PABX di Kantor Pusat BRIS per 1 (satu) tahun.- Melaksanakan perawatan jaringan instalasi.- Melaksanakan setting dan pemindahan extension dan penambahan sesuai port yang ada.- Program PABX sesuai kebutuhan.- Mengontrol penggunaan telepon agar tidak naik dari segi pembayaran.- Training operasional sesuai kebutuhan jika diperlukan (user guide).- Membuat laporan pemakaian telepon user/extension per bulan melalui aplikasi billing.- Pekerjaan lain diluar maintenance.
4.	PT. Bringin Rancang Sejahtera	Konsultasi perencana struktur untuk Renovasi KC Bogor	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan survey dan studi desain.- Menyusun gambar perencanaan dan gambar detail struktur.- Membuat rencana anggaran biaya pekerjaan struktur.- Membuat bill of quantity pekerjaan struktur- Membuat rencana kerja dan syarat-syarat teknis pekerjaan struktur.

Lampiran 5. Pelaporan Kode Etik BNIS

No	Kode Etik	Uraian
1	Menjelaskan ke letan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah dan itiqomah	<p>Irsan BNI Syariah dalam melakukan tugas pekerjaannya harus menghindari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) b. malar, yaitu transaksi yang di antun kan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung - untun an. c. haram, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. d. haram, yaitu transaksi yang dilaran dalam syariah. e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan ba i pihak lainnya.
2	Menjelaskan ke letan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (maslahah) dan berlaku Universal	<p>Irsan BNI Syariah dalam melakukan tugas/ pekerjaannya harus :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memersuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan b. dilakukan dengan semangat rahmatan li alamin yaitu dilakukan untuk semua pihak yang

		berkepentingan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3	Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar.	Seorang Insan BNI Syariah mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat yakni: <ol style="list-style-type: none"> Mencatat setiap data transaksi, akuntansi, keuangan BNI Syariah, kekayaan BNI Syariah, kepegawaian dan data lainnya; Meminta pertanggungjawaban biaya dan atau melakukan pembebanan biaya BNI Syariah, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Menyusun laporan sesuai bentuk dan jenis laporan tersebut.
4	Menjamin pemisahan urusan jabatan	Insan BNI Syariah dilarang: <ol style="list-style-type: none"> Untuk menyalahgunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menyalahgunakan atau menyalahgunakan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan pribadi • Keuntungan pihak-pihak lainnya • Keuntungan pihak-pihak lainnya menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berhutang serta meminjam fasilitas/sarana kepada nasabah, rekanan atau mitra kerja. memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat dikategorikan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain yang sejenis yang bertentangan atau menyalahgunakan kepada tindakan korporasi yang merugikan; Untuk bertindak tidak jujur, menyalahgunakan subjektivitas dalam setiap kebijakan penilaian, misalnya terhadap kualitas dan harga pembelian barang, pemilihan atau penetapan konsultan, pemilihan atau penetapan rekanan, perawatan aset BNI Syariah, pembelian sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.
5	Menjindari bertuan-kepentingan	Insan BNI Syariah dilarang <ol style="list-style-type: none"> melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi Insan BNI Syariah dan atau merugikan kepentingan BNI

		<p>Syarlah dan atau dapat memperoleh anutan pengambilan keputusan terkait dengan jabatannya.</p> <p>b. memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah.</p> <p>c. menambil keuntungan dan dan men unakan aset BNI Syariah, jabatan dan informasi yang seharusnya merupakan keuntungan BNI Syariah;</p> <p>d. Bertindak selaku perantara bagi pihak lain mendapatkan pekerjaan, proyek atau fasilitas dari BNI Syariah yang merugikan BNI Syariah,</p> <p>e. Merangkap jabatan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pen urus Fun dsionaris Partai Politik; • Pejabat Umum meliputi Notaris/PPAT; • Pejabat Eksekutif meliputi Kepala Daerah, Kepala Desa; • Pejabat Legislatif meliputi DPD, DPR atau DPRD; • Pejabat Yudikatif meliputi Hakim Ad Hoc; • Pejabat pada jabatan lain yang menyatakan tidak adanya rangkap jabatan. • Pen urus Or anisasi Massa <p>f. Berkerja untuk kepentingan mitra kerja atau nasabah yang akan atau sedang melakukan kontrak dengan BNI Syariah antara lain sebagai konsultan kecuali mendapat persetujuan dari BNI.</p> <p>g. memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain dalam bentuk apapun yang dapat memperoleh anutan dan kewajibannya di BNI Syariah kecuali telah mendapat persetujuan dari Direksi.</p>
B	<p>Tidak melakukan penyusapan atau menerima dary/atau memberi imbalan dan dionemata (Riywah)</p>	<p>Insan BNI Syariah dilarang :</p> <p>a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab;</p> <p>b. Melakukan pun utan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, orang atau pihak lain;</p> <p>c. Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instansi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah;</p> <p>d. memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah diluar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah.</p>

		<p>Kecuali :</p> <p>a. penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dan lain sebagainya ke BNI Syariah;</p> <p>b. Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika secara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar; sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana Korupsi.</p>
7	Menjaga nama baik BNI Syariah	<p>Insan BNI Syariah bersikap amanah, berakhlak baik, jujur, profesional, cerdas, bertanggung jawab, terbuka dan selalu berpegang kepada nilai Amanah dan Jemah, serta mematuhi sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perusahaan,</p> <p>peraturan-undangan yang berlaku, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kode Etik Bankir Indonesia,</p> <p>Insan BNI Syariah tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan nama baik BNI Syariah.</p>
8	Menjaga Kerahasiaan Bank	<p>Guna menjaga kerahasiaan data bisnis, data keuangan maupun data-data lainnya yang termasuk rahasia Bank, Insan BNI Syariah tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan;</p> <p>b. memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan, baik yang merentang ke luar negeri, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang dijamin dan diamanatkan agar dapat merahasiakan BNI Syariah;</p> <p>c. Menurunkan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak ketiga lainnya</p>
9	Penyusunan Corporate Identity	<p>Insan BNI Syariah dilarang untuk menurunkan Corporate Identity baik berupa logo, kop surat maupun lainnya untuk kepentingan diluar kedinasan, kecuali yang secara jelas diperbolehkan oleh BNI Syariah,</p>
10	Kompetensi	<p>Insan BNI Syariah dalam bekerja, selalu ingin maju dan meningkatkan diri, antara lain dengan</p>

		<p>memperhatikan kompetensi</p> <p>a. Melaksanakan tugas sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki</p> <p>b. Meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri secara berkelanjutan</p>
11	Menjadi panutan	Insan BNI Syariah harus menjadi panutan (surat tauladan) bagi bawahan, rekan dan partner kerja.
12	Adil	Insan BNI Syariah harus bersikap adil, dan adil menempatkan sesuatu sesuai haknya serta memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai keadilannya.
13	Penyimpan informasi	<p>Informasi hanya boleh diberikan oleh pihak yang berwenang dan untuk kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal BNI Syariah.</p> <p>Insan BNI Syariah dilarang :</p> <p>a. Memberikan data dan informasi rahasia kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan;</p> <p>b. Memberikan data dan informasi rahasia kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan;</p> <p>c. Memberikan informasi yang menyebabkan menyalahgunakan atau data mengenai BNI Syariah kepada mitra kerja, nasabah maupun kepada publik;</p> <p>d. Untuk menyalah, menipu, menyalah, menyalah, menyalah, menyalah, menyalah, menyalah, menyalah atau menyebarkan materi dan informasi yang tidak menunjukkan perilaku profesional.</p>
14	Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar Insan BNI Syariah	<p>Harus tercipta suasana kerja yang positif, Insan BNI Syariah harus menjauhkan diri dan menjaga serta tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Persekutuan</p> <p>Melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak melakukan persekutan atau intimidasi terhadap bawahan, sesama rekan kerja, untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, yang menyalah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p>

		<p>b. Pen hinaan Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan tindakan dan atau menucapkan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya.</p> <p>c. Pelecehan Tindakan dan atau ucapan yang menandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesucialan dan kesopanan.</p> <p>d. Provokasi Memfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk keperluan politik atau paham tertentu atau keperluan lain selain yang dapat diabdikan dan dimana akan dapat membahayakan BNI Syariah</p> <p>e. Penyakit tidak sehat Insan BNI Syariah dalam menambatkan karirnya menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara penyakit tidak sehat</p> <p>f. Bertindak oportunistik : Menjual sebarang atau lebih Insan BNI Syariah, tanpa didukung fakta, dan menyebarkan informasi tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif sehingga produktivitas menurun. Menhindari interaksi tidak sesuai ketentuan syariah Dalam berinteraksi dengan atasan, bawahan, dan sesama rekan kerja agar menghindari interaksi diluar ketentuan syariah</p>
15	Pekerjaan menjadi pembicara	Insan BNI Syariah diperbolehkan untuk menjadi narasumber atau pembicara suatu acara yang berkaitan dengan BNI Syariah pada saat jam kerja sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari atasan.
16	Sumbangan dan keterlibatan dalam partai politik	Insan BNI Syariah dilarang : a. Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk perantara dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan

		<p>Pemilu maupun ke latar pejabat politik atau or anisasi yang mempunyai affiliasi dengan partai politik.</p> <p>b. Menjadi or an cta, terdaftar sebagai or an cta, fun donaris atau pen urus partai politik atau calon/or an cta le hlatif.</p> <p>c. ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.</p>
17	Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja.	<p>Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih, dan kondusif serta tidak berpengaruh terhadap Kinerja Insan BNI Syariah, untuk itu Insan BNI Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Menjamin lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah;</p> <p>b. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti men unakan, menyuruh men unakan dan atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya.</p> <p>c. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan etika keislaman;</p> <p>d. Menjaga kebersihan lingkungan kerja tetap bersih, rapi, dan nyaman.</p> <p>e. Menjamin lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah;</p>
18	Menjaga dan men unakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab	<p>Insan BNI Syariah :</p> <p>a. tidak diperbolehkan memanfaatkan aset dan fasilitas BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya;</p> <p>b. Tidak men unakan aset BNI Syariah untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya;</p> <p>c. Wajib menyerahkan seluruh aset yang dibeli dengan mempercayakan dana atau dibeli untuk kepentingan BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama bekerja di BNI Syariah sebelum pensiun berhenti;</p> <p>d. Wajib menyerahkan seluruh aset yang dibeli dengan mempercayakan dana atau dibeli untuk kepentingan BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama bekerja di BNI Syariah sebelum pensiun berhenti;</p>

19	Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial	<p>Insan BNI Syariah mempunyai komitmen untuk melaksanakan bisnis yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>BNI Syariah mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, selalu peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat dan berperan aktif membantu pemenuhan masalah-masalah sosial tersebut dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
----	--	---

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2014
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION
OF ZAKAT FUNDS
 For the Year Ended December 31, 2014
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2014	Catatan/ Notes	2013	
Sumber Dana Zakat				Sources of Zakat Funds
Internal Bank	6.934		5.541	Internal Bank
Eksternal Bank	173		81	External Bank
	<u>7.107</u>		<u>5.622</u>	
Penyaluran Dana Zakat				Distribution of Zakat Funds
Disalurkan ke lembaga lain	7.080		5.615	Distributed to other institutions
Surplus	<u>27</u>		<u>7</u>	Surplus
Sumber Dana Zakat pada Awal Tahun	<u>11</u>	2a	<u>4</u>	Sources of Zakat Funds at Beginning of the Year
Sumber Dana Zakat pada Akhir Tahun	<u>38</u>	2a	<u>11</u>	Sources of Zakat Funds at End of the Year

